

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
KEMANTREN GANDOMANAN
TAHUN 2022**



**Disusun oleh:
Kemantren Gondomanan**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GANDOMANAN**

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦩꦺꦩꦤꦤ꧀

Jl. Ibu Ruswo No 3 A Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 376783 Fax (0274) 376783
EMAIL: gm@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun 2022 dapat tersusun. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya. Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era ekonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya instansi pemerintah ini diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *Good Governance*.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan motivasi kerja bagi Kemantren Gondomanan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Mantri Pamong Praja Gondomanan



Subarjilan, SIP.,M.Si
NIP.19720711 199203 1 006

Executive Summary

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kemantren Gondomanan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah nilai perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat. Sasaran ini dicapai melalui 4 (empat) sasaran antara yaitu : (1) Nilai survei kepuasan masyarakat meningkat, (2) nilai swadaya murni masyarakat meningkat, (3) jumlah pelanggaran Perda menurun, dan (4) reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat.

Secara umum kinerja Kemantren Gondomanan di tahun 2022 dalam mencapai sasaran yang ditetapkan masuk dalam kriteria Sangat Tinggi (diatas 91%). Sasaran strategis nilai perkembangan pembangunan tercapai 367,36 dari target 367 (100,09%). Sasaran antara dan capaiannya :

- 1) nilai survei kepuasan masyarakat tercapai 88,62 dari target 88,57 (100,06%);
- 2) angka swadaya masyarakat tercapai Rp515.392.000,- dari target Rp478.584.000,- (107,69%);
- 3) jumlah pelanggaran Perda menurun dari target 157 terjadi 152 kali (capaian kinerja 103,18%); dan
- 4) nilai Reformasi Birokrasi tercapai 87,19 (Sangat Baik) dari target 80,00 (Baik) atau prosentase capaian 108,99%.

Kinerja keuangan Kemantren Gondomanan juga sangat tinggi, dari target anggaran Rp7.468.286.945,- terealisasikan Rp7.077.553.345,- dengan prosentase capaian 94,77%.

Faktor kunci yang menjadi pendorong keberhasilan kinerja Kemantren Gondomanan di tahun 2022 antara lain adalah : ketersediaan anggaran yang semakin memadai; kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat,

efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi; inovasi sistem dan prosedur pelayanan; pemanfaatan teknologi informasi; dan penerapan sistem *reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Selain itu dukungan faktor eksternal seperti : peran lembaga sosial kemasyarakatan; partisipasi dan swadaya masyarakat yang tinggi; dan sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
<i>Executive Summary</i>	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Kemantren Gondomanan.....	3
1. Kondisi Wilayah	4
2. Struktur Organisasi	7
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	8
4. Isu-isu Strategis Organisasi	10
a. Pelayanan Publik	10
b. Pemberdayaan Masyarakat	13
c. Pembangunan Kewilayahan	14
d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan.....	15
e. Keterbukaan Informasi Publik	16
f. Reformasi Birokrasi	17
g. Dana Keistimewaan	19
5. Keadaan Pegawai	20
6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan	22
D. Sistematika Penyajian	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Perencanaan Strategis 2017-2022	25
1. Visi dan Misi	25
2. Tujuan dan Sasaran.....	26

3. Strategi, Program dan Kegiatan	28
B. Perjanjian Kinerja	31
C. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	32
1. Target Belanja Kemantren Gondomanan	32
2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	34
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya..	40
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	44
4. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis	45
a. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkatkan	45
b. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	49
5. Realisasi Anggaran	54
a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
b. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60
B. Inovasi dan Prestasi.....	62
1. Inovasi	62
2. Prestasi	64
C. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2021	64
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Rencana Tindak Lanjut.....	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Tahun 2022	5
Tabel I.2 Jumlah RW dan RT Kemantren Gondomanan	5
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin	16
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.....	16
Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	17
Tabel I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	17
Tabel II.1 Sasaran Strategis, Sasaran Antara, Program dan Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2022.....	29
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2022....	31
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	32
Tabel II.4 Target Belanja Kemantren Gondomanan APBD Perubahan Tahun 2022	33
Tabel II.5 Anggaran Belanja Non Pegawai Per Sasaran Strategis.....	33
Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan.....	34
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan	36
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program	37
Tabel III.5 Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2021 dan 2022.....	38
Tabel III.6 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2022	40
Tabel III.7 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	41
Tabel III.8 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun Sebelumnya.....	42
Tabel III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu.....	42
Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama	44
Tabel III.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan target Renstra	44

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	45
Tabel III.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Non Pegawai per Sasaran Tahun 2022	55
Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2022	56
Tabel III.15 Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2022	58
Tabel III.16 Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP Tahun 2021 dan Tindaklanjutnya.....	55
Tabel III.17 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Instansi/Organisasi Sejenis.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kemantren Gondomanan	4
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan	7
Gambar 3. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi
- Lampiran 2 Perencanaan Strategis (Matriks Renstra Lima Tahun)
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut LKIP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Triwulan I-IV (print SIM e-LAKIP)
- Lampiran 6 Rencana Aksi (print dari e-LAKIP)
- Lampiran 7 Penghargaan yang Pernah Diterima
- Lampiran 8 Tabel I.7 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan
- Lampiran 9 Tabel I.8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2022
- Lampiran 10 Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan se Kemantren Gondomanan Tahun 2022
- Lampiran 11 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- Lampiran 12 Rekapitulasi Laporan Swadaya Murni Kelurahan Tahun 2022
- Lampiran 13 Rekapitulasi Laporan Kegiatan Tramtibum
- Lampiran 14 Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Gondomanan bulan Desember 2022
- Lampiran 15 Cascading SKP Kemantren Gondomanan Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Oleh karena itu transparansi dipandang menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal itu juga sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi informasi.

Instansi pemerintah harus bertanggung jawab (*accountable*) dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang senantiasa memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang selain sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kemantren Gondomanan secara jelas, transparan dan akuntabel.
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2022 yang dicerminkan dari hasil

pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2022.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kemantren Gondomanan dalam penerapan azas profesional, transparan dan akuntabel.

C. Gambaran Umum Kemantren Gondomanan

Kemantren Gondomanan merupakan salah satu kemantren di Kota Yogyakarta dengan luas 112.00 Ha dan terdiri dari 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Jumlah penduduk Kemantren Gondomanan pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 14,753 jiwa terdiri atas 7.182 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 7.571 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan luas dan jumlah penduduk tersebut maka tingkat kepadatan penduduk Kemantren Gondomanan menjadi 13.172 jiwa/km².

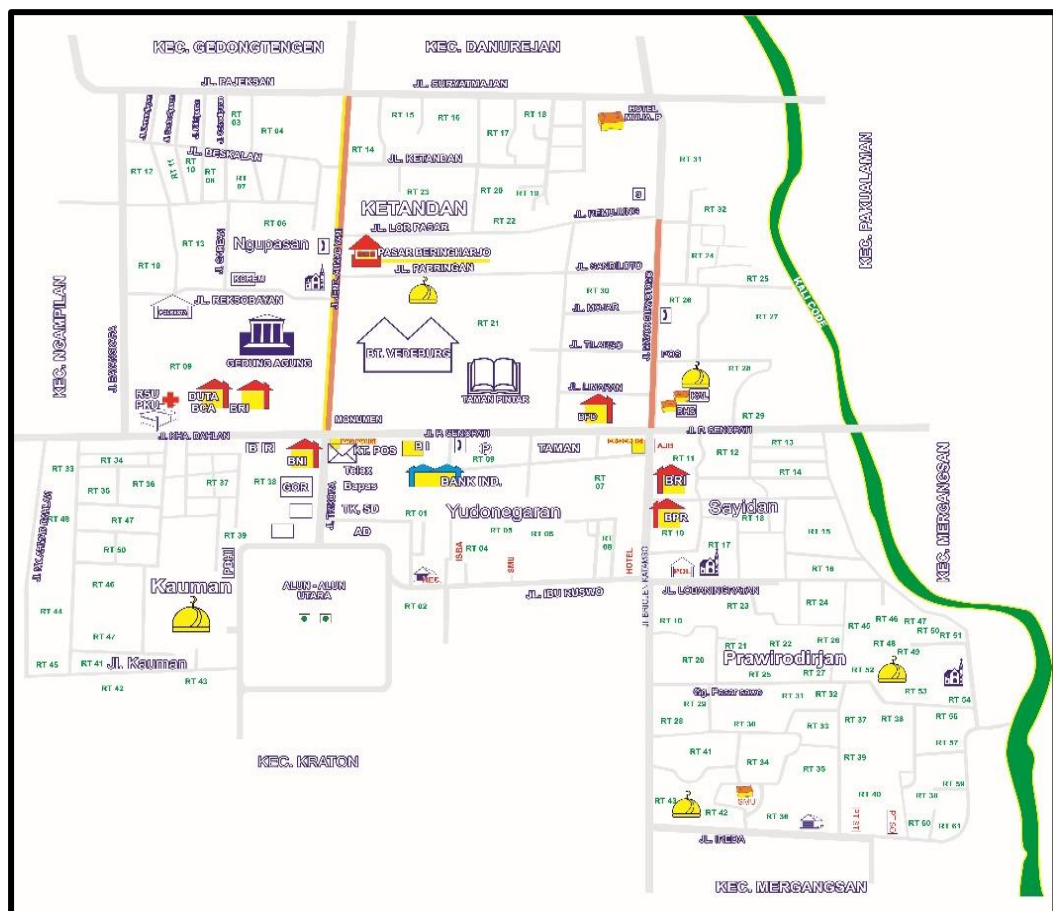
Secara geografis posisi Kemantren Gondomanan merupakan jantungnya Kota Yogyakarta, pusat perekonomian Yogyakarta yang terkenal dengan kawasan Malioboro, Pasar Beringharjo, Alun-alun Utara dan Titik Nol Kilometer. Gondomanan juga masih memiliki gedung-gedung peninggalan sejarah, sekarang disebut dengan gedung cagar budaya seperti Benteng Vredeburg, Gedung Agung/Istana Negara, Bank Indonesia, Kantor Pos, Bank BNI, Masjid Gedhe Kauman dan Gedung Societet Militer/Taman Budaya. Sebagai daerah perkotaan yang padat dan menjadi subyek pariwisata, sebagian penduduk Kemantren Gondomanan bekerja di sektor perdagangan dan jasa.

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta terletak pada ketinggian 113 meter diatas permukaan laut, dilintasi oleh Sungai Code, dengan luas wilayah 1,12 kilometer persegi yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kemantren Ngampilan
- Sebelah Timur : Kemantren Pakualaman
- Sebelah Selatan : Kemantren Kraton
- Sebelah Utara : Kemantren Gedongtengen dan Kemantren Danurejan.

Gambar 1. Peta Kemantren Gondomanan



Jumlah penduduk Kemantren Gondomanan pada akhir tahun 2022 sebanyak 14.753 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 7.182 jiwa dan perempuan 7.571 jiwa.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Tahun 2022

Kelurahan	Luas km2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Prawirodirjan	0,45	9.178	20.395
Ngupasan	0,67	5.575	8.321
Jumlah	1,12	14.753	13.172

Sumber dari BPS Kota Yogyakarta (Buku Kemantren Gondomanan dalam Angka Tahun 2022)

Kemantren Gondomanan juga terbagi menjadi sejumlah kampung, RW dan RT di Kemantren Gondomanan sebagai berikut :

Tabel I.2
Jumlah RW dan RT Kemantren Gondomanan

Kelurahan	Perangkat Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)
Prawirodirjan	8	18	61
Ngupasan	8	13	49
Jumlah	16	31	110

Sumber dari BPS Kota Yogyakarta (Buku Kemantren Gondomanan dalam Angka Tahun 2022)

Selain lembaga-lembaga tersebut diatas juga terdapat kelembagaan masyarakat dan sosial lainnya baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan, diantaranya:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Ngupasan dan Prawirodirjan.
- b. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan.
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kemantren dan Kelurahan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Dasawisma.
- d. Ketua Kampung (ada 7 kampung yaitu : Ngupasan, Ketandan, Ratmakan, Kauman, Yudonegaran, Sayidan, Prawirodirjan).

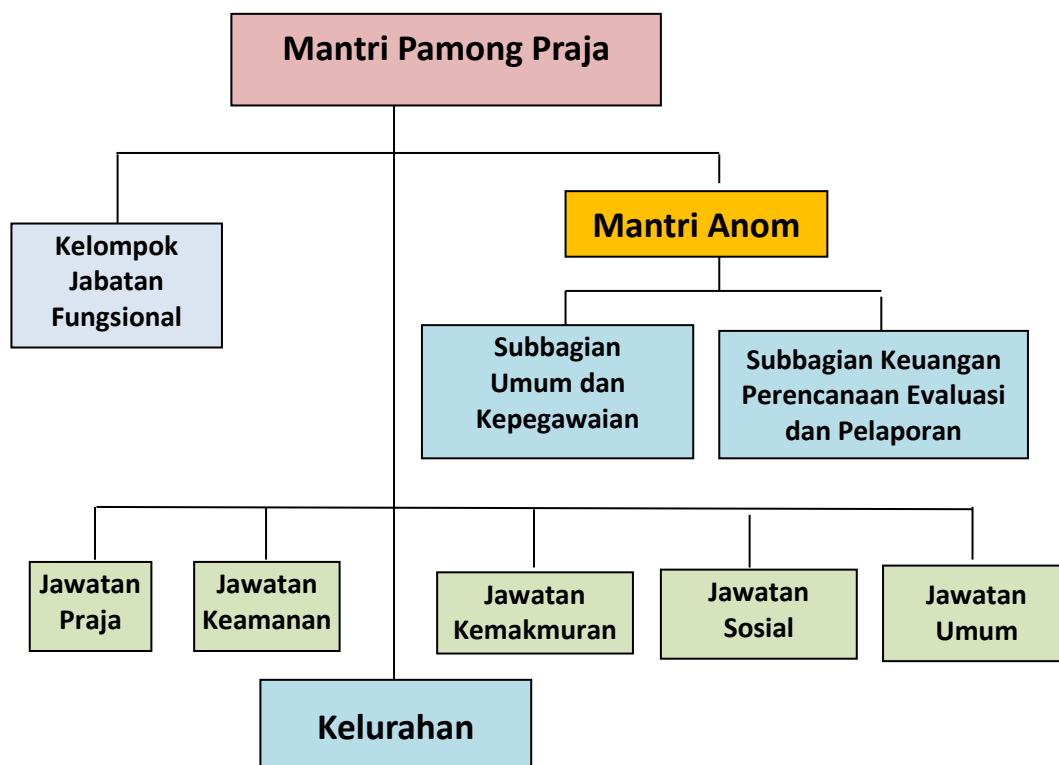
- e. Lembaga-lembaga kemasyarakatan baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan antara lain :
- Karang Taruna Kemantren dan Kelurahan;
 - Kecamatan Sehat, Kelurahan Siaga;
 - Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
 - Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Forkom UMKM);
 - Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI);
 - Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS);
 - Paguyuban Kesenian;
 - Paguyuban Lansia;
 - Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD di tingkat Kemantren dan Kelurahan;
 - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - Kampung KB;
 - Kampung Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak; dan Kemantren Layak Anak;
 - Kampung Panca Tertib;
 - Kampung Wisata;
 - Kampung Tangguh Bencana (KTB);
 - Gapoktan dan Forum Gapoktan;
 - Kampung Proklamasi;
 - KONI Korman Gondomanan;
 - Forum Kemantren Inklusi Gondomanan;
 - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); dan
 - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
 - Forum Bank Sampah Kemantren dan Kelurahan;
 - Jaga Warga;
 - Tim Pembina Jam Belajar Masyarakat (JBM) tingkat Kemantren dan Kelurahan.

2. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Susunan Organisasi Kemantren Gondomanan adalah terdiri dari :

- a. Mantri Pamong Praja;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Mantri Anom terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan



3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan (Kemantren) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kemantren merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemantren dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.

Pembentukan organisasi Kemantren di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecamatan/kemantren menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta pada Pasal 2 disebutkan bahwa Kemantren dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan

kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kemantren tertera pada Pasal 5 sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, Kemantren mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, kemantren di Kota Yogyakarta juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Peraturan Walikota tersebut sebagai penyempurnaan dari peraturan walikota yang mengatur sebelumnya.

4. Isu-isu Strategis Organisasi

a. Pelayanan Publik

Kemantren merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga citra pelayanan publik yang diberikan oleh kemantren kepada masyarakat mencerminkan pula citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya.

Oleh karena itu maka perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus terus menerus dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kemantren untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur pula azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) kepentingan umum;
- 2) kepastian hukum;
- 3) kesamaan hak;
- 4) keseimbangan hak dan kewajiban;
- 5) profesionalisme;
- 6) partisipatif;
- 7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- 8) keterbukaan;
- 9) akuntabilitas;
- 10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- 11) ketepatan waktu; dan
- 12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN), peran dan fungsi kemantren sebagai pusat pelayanan masyarakat makin diteguhkan dan pada tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kemantren se Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur masyarakat. Dalam rangka optimalisasi PATEN

didukung dengan 4 (empat) program dan 12 (duabelas) kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan (kemantren) sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Mantri Pamong Praja telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, yang mencakup pula kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kemantren.

Kemantren merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren Gondomanan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun

pelayanan kepada masyarakat. Kemantren Gondomanan juga telah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pembelian alat kantor, perbaikan gedung kantor kemantren dan kelurahan.

Untuk mengukur kinerja aparatur Kemantren Gondomanan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat maka dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran SKM merupakan indikator kinerja program dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kemantren Gondomanan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kemantren dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kemantren yang melibatkan representasi unsur-unsur dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan

perencanaan yang bersifat *topdown*.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kemantren dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan Mantri Pamong Praja dan Lurah sesuai dengan peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini direncanakan oleh masyarakat, sasaran, penerima manfaat dan pelaksanaanya juga dari masyarakat, hingga pengawasan monitoring dan evaluasi pun selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kinerja program pemberdayaan masyarakat diukur dari angka Swadaya murni masyarakat yang dilaporkan oleh kelurahan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada peraturan walikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren disamping kesesuaian dengan kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pembangunan wilayah berkorelasi dengan tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah

dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Meskipun demikian, sebagian informasi publik mungkin tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka di setiap badan publik dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Penunjukan PPID di Kota Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menilai kinerja PPID maka setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Daerah, yang menunjukkan seberapa informatif kah suatu badan publik.

f. Reformasi Birokrasi

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Reformasi gelombang pertama di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding bidang politik, ekonomi, dan hukum. pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance, dan mengangkat program utama yaitu membangun aparatur negara

melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi gelombang pertama secara bertahap dilaksanakan tahun 2004.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua. reformasi birokrasi bermakna perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta maka ditetapkan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Makro berupa kebijakan penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada 8 (delapan area perubahan) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022; di tingkat Meso berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dengan penetapan perangkat daerah/unit kerja sebagai penanggung jawab/leading sector area perubahan tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta; dan di tingkat Mikro berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan pada perangkat daerah/unit kerja yang selaras dengan roadmap Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota

Yogyakarta tahun 2020 adalah bahwa penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya pada Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak terpilih dalam pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Untuk itu maka kemudian direkomendasikan agar memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah/unit kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi PMPRB secara tepat waktu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah/unit kerja dan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan dan memotivasi pelaksanaan reformasi birokrasi maka nilai indeks pelaksanaan RB ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja program internal di setiap OPD dan capaian indeks RB menjadi salahsatu indikator dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

g. Dana Keistimewaan

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bergulir selama satu dasawarsa maka institusi kemantren/kelurahan selain mengalami sejumlah perubahan nomenklatur kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, juga mulai terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari anggaran dana keistimewaan. Keterlibatan kemantren/kelurahan dalam program/kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Tantangan yang dihadapi kemantren/kelurahan dalam situasi ini salah satunya adalah kurangnya personil baik secara kuantitas maupun kualitas (kompetensi) untuk menangani tugas tambahan terkait dana keistimewaan ini.

5. Keadaan Pegawai

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Kemantren Gondomanan sampai dengan akhir tahun 2022 terdiri atas PNS 28 orang, Naban 2 orang dan PTT 7 orang. Total jumlah pegawai (PNS dan Naban/TT) Kemantren Gondomanan adalah 37 orang, dari jumlah formasi sesuai hasil analisis jabatan sebanyak 50 orang, sehingga kebutuhan pegawai baru terpenuhi 74% atau terdapat kekurangan 13 orang. Seluruh jabatan struktural telah terisi, namun masih ada beberapa jabatan fungsional umum yang belum terpenuhi. Agar kinerja organisasi dapat terus berjalan optimal maka beberapa jabatan fungsional umum kemudian dipenuhi dengan cara *outsourcing* atau pengadaan kontrak kerja dengan penyedia jasa orang perseorangan (tenaga teknis) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk data pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Berdasarkan Jabatan,
Golongan dan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	-	1	1
2.	Mantri Anom	-	1	-	-	-	1	1
3.	Kepala Jawatan	2	3	-	-	4	1	5
4.	Kasubbag	1	1	-	-	2	-	2
5.	JFU Kemantren	1	7	-	4	4	-	8
7.	Lurah	2	-	-	-	2	-	2
8.	Sekretaris Kel.	-	2	-	-	2	-	2
9.	Kasi Kelurahan	3	3	-	-	6	-	6
10.	JFU Kelurahan	-	1	1	-	-	-	1
11.	Naban	2	-	-	-	-	-	2
12.	Tenaga Teknis	5	2	-	-	-	-	7
	Jumlah	17	20	1	4	20	3	37

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Data Diklat Struktural/penjenjangan bagi pejabat struktural:

Tabel I.4
Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Diklatpim III/PKA	2	1	1
2	Diklatpim IV/Adum/PKP	11	5	6
4	Pejabat Struktural yang belum mengikuti diklat penjenjangan	6	3	3

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S2	3	1	2
2	S1	16	9	7
3	D III	4	-	4
4	SLTA	2	-	2
5	SLTP	1	1	-
6.	SD	1	-	1
	Jumlah	27	11	16

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

Tabel I.6
Jumlah pegawai berdasarkan eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	7	4	3
4	IV B	10	5	5
	Jumlah	19	10	9

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa dari aspek kualitas, kompetensi yang dimiliki SDM pegawai Kemantren Gondomanan sudah cukup memadai, meskipun secara kuantitas masih belum mencukupi.

6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan keadaan sarana prasarana berupa barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.7 (Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan).

Untuk melaksanakan semua kegiatan berbasis kinerja secara optimal, maka diperlukan dukungan anggaran yang terinci sesuai jenis penggunaannya. Dukungan anggaran bagi Kemantren Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.8 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2022).

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2022 Kemantren Gondomanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp7.468.286.945,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp4.192.586.000,- dan belanja Non Pegawai sebesar Rp3.275.700.945,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Non Pegawai yang berasal dari APBD sebesar Rp4.192.586.000,- yang didukung oleh 4 (empat) program dan 31 (tigapuluh satu) kegiatan.

D. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan, Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKIP.

BABII PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2017 - 2022

1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta periode 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

b. Misi

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat;
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
- 3) Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- 5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan permukiman; dan
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Dalam mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi tersebut diatas, Kemantren Gondomanan selanjutnya menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

- 1) Kemiskinan masyarakat menurun;
- 2) Keberdayaan masyarakat meningkat;
- 3) Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
- 4) Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
- 5) Pertumbuhan ekonomi meningkat;
- 6) Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
- 7) Kualias pendidikan meningkat;
- 8) Harapan hidup masyarakat meningkat;
- 9) Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
- 10) Infrastruktur wilayah meningkat;
- 11) Kualitas lingkungan meningkat; dan
- 12) Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu maka Kemantren Gondomanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren. Adapun tujuannya yaitu **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dengan formula : ***jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan***. Pada awal Renstra (2017) nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra (2022) adalah 367.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu

pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kemantren Gondomanan menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dengan formula:

$$\text{Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan} \\ \text{kelurahan} : \text{jumlah kelurahan.}$$

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 360. Dalam perkembangannya, capaian nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan di tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan (dari target 352 tercapai 365,5), sehingga kemudian dilakukan penyesuaian target di tahun 2019 yang semula 354 direvisi menjadi 365,5 (minimal sama dengan capaian tahun sebelumnya), sedangkan di tahun 2022 ditargetkan di angka 367.

Pengukuran kinerja di dalam Rencana Strategik Instansi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi Rencana Strategik Instansi Kemantren Gondomanan. Agar dalam pelaksanaan Rencana Strategik Kemantren Gondomanan terdapat kesatuan arah kebijakan, maka diperlukan adanya landasan berpijak. Untuk mewujudkannya diperlukan serangkaian upaya yang mampu mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meliputi :

- 1) Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang tinggi.
- 2) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

- 3) Menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan bebas dari KKN untuk memulihkan kepercayaan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan.
- 5) Mengupayakan penegakan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
- 6) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.
- 7) Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan yang prima.
- 8) Pelaksanaan pelayanan dilakukan secara procedural dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 9) Fasilitasi dan motivasi berdasarkan pada tingkat kewenangan dilakukan berdasar pada kemitraan dan kerjasama yang sejajar antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
- 10) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasar pada target dan penetapannya.

3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kerangka perencanaan strategis di Kemantren Gondomanan adalah dengan langkah-langkah pengambilan kebijakan, program dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang diambil berkaitan dengan perencanaan strategis Kemantren Gondomanan tertuang di dalam kerangka perencanaan Strategis di Kemantren Gondomanan adalah dengan menetapkan 4 (empat) program dan 12 (duabelas) kegiatan sebagai berikut :

Tabel II.1
 Sasaran Strategis, Sasaran Antara, Program dan Kegiatan
 Kemantren Gondomanan Tahun 2022

N o.	Sasaran Strategis	Sasaran Antara	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi meningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah – Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD – Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN – Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD – Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD – Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor – Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor – Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya – Penyediaan Jasa Surat Menyurat – Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik – Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan – Pemeliharaan Mebel – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya – Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kemantren – Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum – Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha – Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	Jumlah Pelanggaran Perda menurun	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> – Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat – Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI
	Angka Swadaya Masyarakat meningkat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> – Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan – Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan – Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan – Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas perlu adanya dukungan untuk membangun semangat mencapai tujuan dengan motto **"SATU HATI UNTUK MELAYANI"**, mengandung maksud bahwa dalam setiap langkah melaksanakan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi instansi tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan aturan namun juga dilandasi dengan hati ikhlas sebagai sebuah ibadah. Dengan berpegang pada motto ini diharapkan dalam melaksanakan kinerja tidak hanya fokus pada target semata namun juga didasari dengan keikhlasan dan berlandaskan pada delapan asas nilai, yakni : Sederhana, Adanya kepastian/kejelasan, Keamanan, Transparansi, Efisien, Ekonomis, Keadilan dan Ketepatan Waktu.

B. Perjanjian Kinerja

Rencana kinerja merupakan hasil dari proses penetapan perencanaan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Secara ringkas perencanaan kinerja Kemantren Gondomanan pada tahun 2022 baik program kegiatan maupun besarnya alokasi anggaran dapat dilihat pada penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai berikut:

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Tar-get (3)	Program Kegiatan (4)	Anggaran (Rp) (5)
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.224.516.753
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Melalui mekanisme perubahan anggaran APBD 2022 maka perjanjian kinerja mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar-get	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.275.700.945
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

C. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Kemantren Gondomanan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran murni sebesar Rp6.871.509.753,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp3.646.993.000,- dan Belanja Non Pegawai Rp3.224.516.753,-.

Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp7.468.286.945,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp 4.192.586.000,- dan Belanja Non Pegawai Rp3.275.700.945,-.

1. Target Belanja Kemantren Gondomanan

Target Belanja Kemantren Gondomanan Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.4

Target Belanja Kemantren Gondomanan APBD Perubahan 2022

Uraian	Target	Prosentase
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	Rp. 4.192.586.000,-	56,14 %
Belanja Non Pegawai	Rp. 3.275.700.945,-	43,86 %
Jumlah	Rp. 7.468.286.945,-	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Kemantren Gondomanan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.5

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi/ Prosentase	Kete- rangan
1	2	3	4	5
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Rp3.275.700.945	Rp3.226.527.497 (98,50 %)	

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju *Good Governance* dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kemantren Gondomanan untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kemantren Gondomanan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel III.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target						Sumber data
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	350	352	365,5	366	366,5	367	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus : ***(realisasi capaian kinerja : target) x 100***. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus: ***(jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan: jumlah kegiatan)***.

Kinerja Kemantren Gondomanan dinilai berdasarkan pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan}}{\text{jumlah kelurahan}}$$

Nilai yang didapat kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan pada Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.3

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
Meningkatkan perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	367,36	100,1%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan adalah **100,1%** dengan nilai peringkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 4(empat) program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dengan indikator kinerja : nilai reformasi birokrasi kemantren Gondomanan meningkat
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja : nilai survey kepuasan masyarakat meningkat;
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dengan indikator kinerja jumlah pelanggaran Perda menurun, dan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. dengan indikator kinerja : angka swadaya masyarakat meningkat.

Selanjutnya capaian kinerja program tahun 2022 dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

Tabel III.4

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	80	87,19	108,99%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,57	88,62	100,06%
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	157	152	103,18%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni Masyarakat	Rp 478.584.000	Rp 515.392.000	107,69%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Rumus penghitungan nilai indikator untuk sasaran strategis dan program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan.

Nilai Reformasi Birokrasi perangkat daerah merupakan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) tingkat Kota Yogyakarta terhadap pengisian Lembar Kerja Elektronik (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) beserta kesesuaian bukti dukung yang diunggah. Indeks yang diperoleh Kemantren Gondomanan untuk tahun 2022 adalah sebesar 31,65 dari indeks maksimal 36,30, atau jika dikonversi nilai menjadi **87,19**.

Dari target nilai **80** maka prosentase capaian yang diperoleh adalah **108,99%** atau termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

- b.** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dihitung menggunakan rumus perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan

Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulasnya adalah :

Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25.

Berdasarkan capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2022 pada tabel di atas maka prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari target 88,57 tercapai **88,62** prosentase capaian **100,06%** dengan nilai peringkat kinerja **Sangat Baik**.

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Angka Swadaya Masyarakat, diperoleh dari jumlah angka swadaya murni masyarakat di Kelurahan se Kemantren Gondomanan selama setahun. Formulasnya adalah :

Jumlah nilai swadaya murni kelurahan se Kemantren Gondomanan

Formula ini diperbarui mulai tahun 2020 sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan (atau dikenal sebagai Dana Kelurahan) yang menghapus komponen dana stimulan PMK, sehingga angka swadaya masyarakat dihitung dari data laporan nilai swadaya murni masyarakat, yaitu jumlah angka nominal kegiatan yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Data nilai swadaya masyarakat kelurahan se Kemantren Gondomanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5

Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2022

NO	Kelurahan	Nilai swadaya murni tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(4)
1.	Ngupasan	348.620.000
2.	Prawirodirjan	166,772.000
	Jumlah	515.392.000
	Target	478.584.000
	Persentase capaian	107,69 %

Sumber : Laporan Swadaya Murni Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, 2022.

Berdasarkan data capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2022 pada tabel diatas maka untuk indikator swadaya masyarakat tercapai Rp515.392.000,- dari target Rp478.584.000,- sehingga prosentase capaian kinerjanya **107,69%** dengan nilai peringkat **Sangat Baik**.

- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator penurunan jumlah pelanggaran Perda, dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran Perda dengan target yang ditetapkan berdasarkan trend jumlah pelanggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Keamanan diketahui bahwa jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kemantren Gondomanan sepanjang tahun 2022 tercatat 152 kali dari target yang ditetapkan 157 kali, atau terjadi penurunan 3,29%. Dari formula diatas maka dapat diketahui prosentase capaian kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun Anggaran 2022 untuk adalah **103,18%** dengan nilai peringkat **Sangat Baik**.

Dalam upaya merealisasikan program-program tersebut diatas secara efektif dan efisien maka perlu didukung aspek keuangan. Pada tabel dibawah ini ditunjukkan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja keuangan program Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel III.6
 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja
 Program Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.231.887.297,-	4.856.525.490,-	92,83 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	299.651.254,-	298.596.254,-	99,65 %
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	160.615.000,-	160.615.000,-	100 %
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.776.133.394,-	1.761.816.601,-	99,19 %
	Jumlah/rata-rata	7.468.286.945,-	7.077.553.345,-	94,77 %

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja keuangan semua program berada diatas 91% atau masuk kategori capaian **Sangat Tinggi**. Bahkan untuk program kerja yang menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai realisasi rata-rata 99,61%. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa Kemantren Gondomanan telah menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan yang baik dan mampu melaksanakan semua rencana secara efektif dan efisien serta mencapai target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Keman-tren Gondoma-nan	Tingkat perkem-bangan pemba-ngunan Keman-tren Gondoma-nan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Keman-tren Gondomanan	366.5	367	367	367,36	100,14	100,1

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Kemantren Gondomanan tahun 2022 mengalami peningkatan 0.36 point dari capaian tahun sebelumnya, namun prosentase capaian kinerjanya sama. Hal ini menunjukkan bahwa tetap ada dinamika dan peningkatan dalam komponen-komponen parameter yang menyusun indikator nilai tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren meskipun dalam skala yang kecil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2021-2022, diantaranya dampak pandemi Covid19 yang mulai melandai pada periode tersebut.

Dari data hasil penilaian tingkat perkembangan pembangunan di level kelurahan maka diketahui bahwa Kelurahan Ngupasan mendapatkan nilai sedikit lebih tinggi (367,65) daripada Kelurahan Prawirodirjan (367,075). Hal ini disebabkan perkembangan infrastruktur sarana prasarana dan dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Ngupasan yang dinilai relatif lebih cepat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana fisik dan fasilitas publik di Kelurahan Ngupasan berjalan lancar, yang dimaksudkan untuk merespons usulan dan kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan melalui mekanisme Musrenbang. Dengan sarana prasarana dan fasilitas publik yang semakin lengkap dan membaik maka akan mendorong masyarakat untuk semakin dinamis dalam melaksanakan kegiatan sosial ekonominya yang sempat terpuruk akibat dampak Pandemi Covid-19.

Sasaran strategis Kemantren Gondomanan pada RPJMD tahun 2017-2022 masih sama dengan RPJMD sebelumnya yaitu tingkat perkembangan pembangunan Keman-tren Gondomanan meningkat.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka mulai tahun 2020 pada tataran Program dan indikator kinerja mengalami beberapa perubahan. Aspek yang berubah diantaranya pada nomenklatur program, formula indikator nilai swadaya masyarakat (yang semula adalah prosentase nilai swadaya komplemen stimulan PMK), serta penambahan indikator penurunan jumlah pelanggaran Perda untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan nilai Refromasi Birokrasi untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Dinamika tersebut menyebabkan kesulitan untuk membandingkan capaian realisasi kinerja indikator dengan periode tahun-tahun sebelumnya.

Pada tabel berikut memperlihatkan perbandingan capaian target kinerja masing-masing program pada tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.8
Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2022
dengan Tahun-tahun Sebelumnya.

No	Program	Indikator	Target Tahun						Prosentase Realisasi Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	87,19 (108,99%)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87	87,02	87,4	87,7	87,9	87,9	87,63 (100,7%)	87,51 (100,56%)	88,18 (100,89%)	87,7 (100%)	88,57 (101%)	88,62 (100,06%)
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	-	-	-	-	160	157	-	-	-	-	145 (109,38%)	152 (103,18%)
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	10%	12%	14%	460.000.000	469.200.000	478.584.000	14%	25%	25%	759.386.500 (165,08%)	480.256.250 (102%)	515.392.000 (107,69%)

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Sedangkan persentase perbandingan capaian kinerja keuangan masing-masing program Kemantren Gondomanan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel III.9

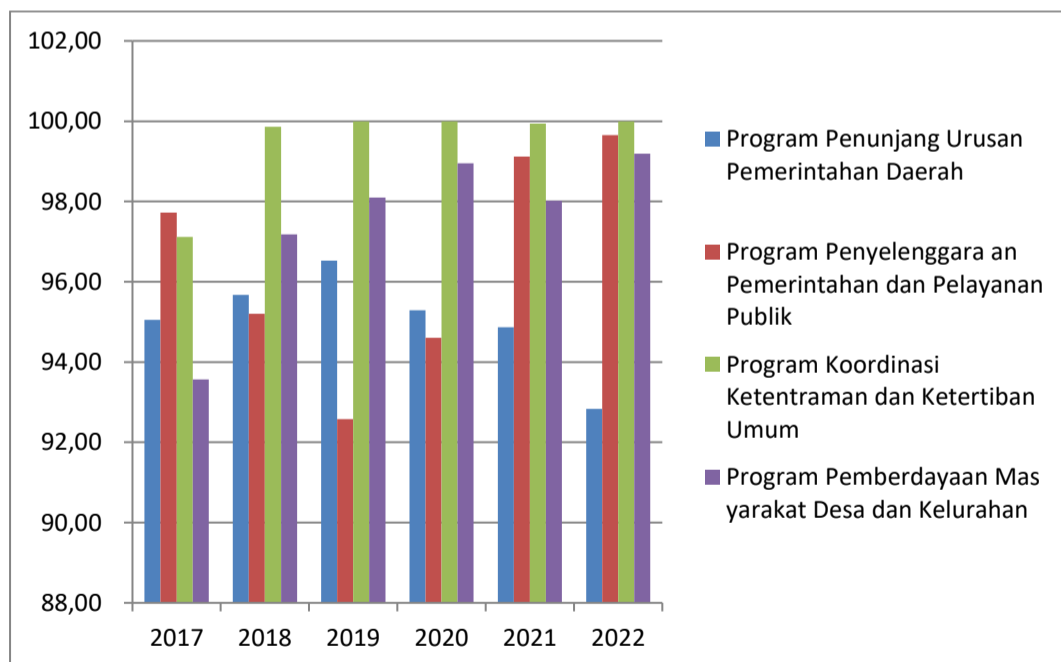
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2022 dengan Tahun Lalu

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,05	95,67	96,53	95,29	94,87	92,83
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	97,72	95,20	92,58	94,60	99,12	99,65
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	97,12	99,86	100	100	99,94	100
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	93,57	97,18	98,1	98,95	98,02	99,19

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Gambar 3

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2022 dengan Tahun Lalu



3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam menilai pencapaian tujuan jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maka perlu dievaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun apakah sudah selaras dengan target tujuan tersebut.

Tabel III.10

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	367,36	367	100,1%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Selanjutnya capaian indikator kinerja program dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.11

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	80	87,19	80	108,99%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,57	88,62	88,57	100,06%
3.	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	157	152	157	103,18%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	478.584.000	515.392.000	478.584.000	107,69%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis dan semua program di Kemantren Gondomanan masuk kategori Sangat Tinggi dengan prosentase capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran faktor-faktor yang mendukung kinerja Kemantren Gondomanan tersebut. Meskipun masih ada beberapa faktor penghambat, namun berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* serta motivasi dan semangat untuk melayani dengan hati, maka hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir.

4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kemantren Gondomanan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat didukung dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : nilai survei kepuasan masyarakat, tingkat swadaya masyarakat dan penurunan angka pelanggaran Perda. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	IKU : Nilai rata-rata tingkat perkembangan pembangunan masyarakat kelurahan	Jumlah nilai tingkat perkembangan pembangunan masyarakat kelurahan dibagi jumlah kelurahan
		Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		Angka swadaya masyarakat	Jumlah nominal kegiatan yang dibiayai secara swadaya
		Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25
		Penurunan jumlah pelanggaran Perda	Jumlah laporan pelanggaran Perda

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Sasaran strategis tahun 2022 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka optimis target akhir Renstra di tahun kelima akan dapat dicapai. Selain itu, capaian target pada program-program yang mendukung sasaran strategis juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan bahkan melebihi target. Hal ini juga menunjukkan trend positif pencapaian kinerja program di tahun-tahun mendatang.

Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing indikator program adalah sebagai berikut :

(1) Nilai Reformasi Birokrasi, dari target 80 tercapai 87,19 atau prosentase capaian 108,99%. Berdasarkan hasil penilaian PMPRB oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Kota Yogyakarta pada Kemantren Gondomanan Tahun 2022 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Aspek pemenuhan dengan nilai 12,22 dari bobot 14,60;
- Aspek Reform dengan nilai 19,42 dari bobot 21,70.

Sehingga nilai total adalah 31,65 dari bobot nilai maksimal 36,30 yang jika dikonversi menjadi $31,65/36,30 \times 100 = 87,19$. Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Terdapat beberapa catatan yang memerlukan perhatian sebagai berikut :

- a) Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi namun masih kepada sebagian kecil pegawai.
- b) Belum terdapat bukti dukung atas kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan.
- c) Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan.
- d) Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan baru dilaksanakan sekali dalam setahun.

Terhadap beberapa catatan tersebut Kemantren Gondomanan direkomendasikan untuk melakukan perbaikan dan telah ditindaklanjuti.

(2) Angka swadaya masyarakat, dari target Rp 478.584.000,- tercapai sebesar Rp 515.392.000,- atau pada prosentase 107,69% dari target yang ditetapkan.

Secara umum terdapat peningkatan prosentase capaian dari tahun sebelumnya (tahun 2021 tercapai 102%) disebabkan adanya beberapa kegiatan sosial masyarakat yang semula dilaksanakan dengan swadaya (pertemuan/rapat rutin RT, RW, PKK, Dasawisma) yang pada masa pandemi harus menerapkan protokol kesehatan sehingga harus dikurangi frekuensi atau jumlah pesertanya, bahkan ada pula yang ditiadakan untuk sementara, sehubungan dengan situasi kondisi pandemi yang mulai aman terkendali maka kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan berangsur-angsur normal kembali. Disamping itu, angka swadaya murni yang dikeluarkan masyarakat untuk berbagai kegiatan yang masih dilakukan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 di tingkat mikro tetap dicatat dan dilaporkan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain penyemprotan desinfektan, bantuan permakanan bagi warga yang isolasi mandiri, penyediaan tempat cuci tangan, edukasi protokol kesehatan, donasi untuk Dapur Balita Posyandu, dan pembentukan Satgas Covid-19 sampai tingkat RT.

Dari pencermatan laporan diperoleh data bahwa angka swadaya murni di Kelurahan Ngupasan tercapai sebesar Rp348.620.000,- dan di Kelurahan Prawirodirjan tercatat Rp166.772.000,-.

(3) Nilai survei kepuasan masyarakat, dari target 88,57 tercapai 88,62 atau prosentase capaian 100,56%. Nilai rata-rata setiap unsur pelayanan adalah 3.545, meningkat 0,003 point dari tahun sebelumnya (tahun 2021 nilai rata-rata setiap unsur 3.542). Unsur yang mendapat nilai tertinggi pada unsur perilaku pelaksana (nilai 3.647) dan terendah pada unsur waktu penyelesaian (nilai 3.520) dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan (nilai 3.540).

Peningkatan nilai survei kepuasan layanan secara umum dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dalam rangka penegakan protokol kesehatan, dimana terjadi migrasi proses pelayanan dari

manual/offline dirubah ke sistem layanan daring/online dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan dukungan aplikasi *Jogja Smart Services (JSS)* yang semakin lengkap fiturnya, dan inovasi layanan secara *drive-thru* di beberapa titik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Fasilitas ini gratis, dan bagi masyarakat pengguna layanan tentunya semakin menekan biaya yang harus dikeluarkan (untuk fotokopi berkas, transportasi ke lokasi pelayanan, dan lain-lain).

Untuk unsur layanan yang nilainya masih dibawah rata-rata juga telah dilakukan terobosan antara lain dengan pendampingan kepada pengguna layanan untuk meningkatkan kecepatan waktu layanan, dan meningkatkan responsifitas dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selain itu untuk meningkatkan nilai kepuasan layanan secara umum dilakukan upaya antara lain : menyempurnakan beberapa SOP pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan di masa Pandemi; membuat video tutorial pelayanan untuk dishare di media sosial Kemantren dan warga; dan mengoptimalkan peran kader Pekerti dalam memfasilitasi dan mengakselerasi pelayanan dalam Paket Komanan.

- (4) Jumlah pelanggaran Perda, mengalami penurunan dari target yang ditetapkan karena kegiatan penegakan Perda lebih diintensifkan simultan dengan kegiatan penegakan protokol kesehatan pencegah penyebaran Covid-19. Persentase pelanggaran terbanyak adalah pedagang kakilima (PKL) yang tidak tertib karena berjualan di lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan (kawasan pedestrian), tidak menjaga kebersihan, dan tidak menaati protokol kesehatan. Selain itu ada juga pemasangan reklame/poster/banner yang tidak pada tempatnya, dan pelanggaran IMB.

Upaya penegakan Perda yang dilakukan antara lain : merelokasi PKL yang berjualan di kawasan pedestrian Jalan KHA Dahlan, penertiban PKL, dan patroli terpadu bersinergi dengan Forkompim Kemantren Gondomanan (Polsek, Koramil, Puskesmas, BKO, Satuan Linmas, dan Forum Komunitas Alun-alun Utara).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dari hasil analisis laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kemantren Gondomanan tahun 2022 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi. Sebagaimana diuraikan pada Bab II laporan ini. indikator kinerja berupa “Meningkatkan Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan” pada tahun 2022 ditargetkan 367 sedangkan dilihat dari nilai rata-rata tingkat perkembangan pembangunan kelurahan se Kemantren Gondomanan tahun 2022 adalah 367,36 atau tercapai 100,1% dengan kategori capaian Sangat Tinggi.

Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1) Faktor internal

(a) Ketersediaan anggaran yang semakin memadai

Program kerja yang direncanakan dapat terlaksana karena terencana dengan baik termasuk kebutuhan anggarannya. Pembiayaan dan anggaran sudah sesuai pula dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

(b) Kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) perangkat daerah Kemantren Gondomanan memang dapat menjadi kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses motivasi pembelajaran yang terus menerus maka Kemantren Gondomanan berhasil mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

(c) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan

monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar. Guna mengefektifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah disusun dalam bentuk RKA dan DPA SKPD Kemantren Gondomanan kemudian lebih didetailkan lagi. Tatakala kegiatan disusun sampai dengan level hari/tanggal pelaksanaan kegiatan dan target harian, sehingga semakin mempermudah dalam operasionalisasinya. Selain itu, secara simultan juga dilakukan monitoring dan evaluasi sesering mungkin sehingga meminimalisir celah terjadinya kesalahan, keterlambatan, atau penyimpangan. Apabila ditemui permasalahan dan hambatan pun dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, agar tidak mengganggu upaya pencapaian target dan tujuan.

Dalam rangka penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan serta responsivitas gender di semua program/kegiatan, maka setiap Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) diharuskan menyusun kerangka acuan kerja (KAK), menyusun *Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement (GAP/GBS)* dan melakukan analisis resiko dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Selain itu, pada akhir tahun anggaran setiap PPTK diwajibkan menyusun laporan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pegawai yang bersangkutan.

(d) Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan

Dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian tujuan maka suatu institusi harus terus berupaya mencari celah-celah inovasi yang bisa dilakukan. Selain adanya dorongan dari Pemerintah Kota untuk terus mengembangkan inovasi, inspirasi perubahan demi efisiensi dan terbaik melayani juga harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu dalam organisasi. Beberapa inovasi dan penyederhanaan sistem

prosedur pelayanan di Kemantren Gondomanan tahun 2022 antara lain :

- Penyempurnaan Paket Komanan

Paket Komanan yang diluncurkan pada bulan September 2019 dan mendapat sambutan positif, dukungan dan apresiasi dari segenap warga masyarakat serta pihak-pihak terkait, disempurnakan dengan mengevaluasi dan menyesuaikan SOP paket layanan dengan perubahan aturan di tingkat yang lebih tinggi, situasi pandemi, dan perkembangan teknologi.

- Sosialisasi SOP pelayanan secara virtual

Untuk merespon keingintahuan masyarakat terhadap informasi prosedur baru pelayanan di masa pandemi, maka dilakukan sosialisasi secara virtual, mengingat kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk mengumpulkan warga guna diberikan informasi pelayanan secara langsung. Sosialisasi dilakukan dengan membuat video pendek berdurasi 3-5 menit berisi tentang SOP dan tatacara mengakses layanan. Video kemudian disebarluaskan dengan diunggah ke website dan media sosial Kemantren Gondomanan, serta dishare ke grup-grup whatsapp RT/RW dan warga.

- Pendampingan pelayanan

Terhadap warga yang masih belum memahami prosedur pelayanan secara online, atau bagi warga yang memiliki keterbatasan dan kurang memahami penggunaan gadget maka dalam mengakses pelayanan bisa didampingi oleh petugas.

(e) Pemanfaatan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat dirasakan sangat membantu dalam mengakselerasi pencapaian target program dan kegiatan. Melalui aplikasi *Jogja Smart Services (JSS)* yang memuat ratusan macam SIM sangat memudahkan bagi warga masyarakat dan perangkat Kemantren Gondomanan dalam mengakses informasi, memberikan layanan, mengolah data, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan, hingga menyampaikan publikasi sebagai wujud akuntabilitas. Selain itu pemanfaatan berbagai platform media sosial juga mendukung

penyebarluasan informasi dan percepatan koordinasi.

- (f) Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai

Dalam rangka mendorong motivasi berkinerja dan semangat berprestasi maka dipandang perlu untuk menerapkan *system reward and punishment*. Bentuknya adalah pemberian reward berupa piagam penghargaan dan hadiah dari pimpinan organisasi (Mantri Pamong Praja) bagi pegawai yang dapat mencapai kinerja yang tinggi, dan hukuman/sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan atau jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

2) Faktor Eksternal

- (a) Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kemantren Gondomanan mulai dari tingkat terendah (RT, RW, kampung, kelurahan, kemantren) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini memberikan dampak positif berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

- (b) Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Bahkan indikator nilai tingkat swadaya masyarakat ini menjadi cerminan tinggi rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang kurang produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan

pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan secara lebih inklusif dibangun melalui Musrenbang Tematik, dimana tahapan Musrenbang di tingkat kemantren diformat secara horisontal dengan membentuk 3 (tiga) klaster, yaitu klaster pembangunan prasarana fisik, klaster kesehatan, perempuan dan anak, dan klaster ekonomi sosial budaya. Melalui sistem klasterisasi tersebut diharapkan pembahasan dan penyusunan rencana jangka pendek menengah dan panjang dari masing-masing klaster dapat lebih fokus, intensif, holistik dan integratif.

(c) Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka

Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompimka) yang terdiri dari Mantri Pamong Praja (selaku koordinator), Kapolsek, Danramil, Kepala UPT Puskesmas dan Kepala KUA dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koordinasi, sinergi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan.

Beberapa contoh sinergitas yang telah dibangun antara lain :

- Keterlibatan Forkompimka dalam program kado 17 GM bagi warga usia 17 tahun yang baru mengurus KTP, diberikan bingkisan yang salahsatunya berisi buletin yang materinya berasal dari masing-masing *stakeholder* Forkompimka, yang dimaksudkan guna memberikan bekal informasi yang lebih lengkap bagi remaja yang memasuki usia 17 tahun;
- keterlibatan UPT Puskesmas dan KUA dalam beberapa proses administrasi kependudukan yang terangkum dalam Paket Komanan;
- Sinergitas dalam penanganan Covid-19 dalam bentuk kegiatan bersama antara lain : edukasi kepada masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru, sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan, verifikasi kegiatan sosial yang aman Covid-19, penegakan PPKM mikro, vaksinasi massal, penanganan isolasi mandiri, dan keterpaduan gerak dalam kegiatan Satgas

Covid-19 Kemantren Gondomanan;

- Kebersamaan dalam berbagai kegiatan seperti penanganan masalah sosial di wilayah Kemantren Gondomanan, olahraga dan pemantauan wilayah bersama tiap Jumat pagi, dan sebagainya.

5. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Non Pegawai pada tahun 2022 sebesar 98,50% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,61%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,83%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran jumlah pelanggaran Perda menurun (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran pendukung (92,83%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja Non Pegawai tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.13

Anggaran dan Realisasi Belanja Non Pegawai per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Tar get	Reali- sasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi	80	87,19	108,99	5.231.887.297	4.856.525.490	92,83
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,57	88,62	100,056	299.651.254	298.596.254	99,65
		Jumlah pelanggaran Perda	157	152	103,18	160.615.000	160.615.000	100
		Angka Swadaya Masyarakat	478.584.000	515.392.000	107,69	1.776.133.394	1.761.816.601	99,19
Jumlah						7.468.286.945	7.007.553.345	94,77
Total Belanja Non Pegawai						3.275.700.945	3.226.527.497	98,50

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sangat tinggi. Meskipun demikian ada beberapa komponen biaya yang memang tidak dapat diserap maksimal (100%) karena efisiensi, dengan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas output yang dihasilkan.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja organisasi maka anggaran dan realisasi program-program dirinci lagi per kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diidentifikasi beberapa kegiatan yang penyerapannya tidak dapat optimal yang akan dianalisis pada sub bab berikutnya.

Tabel III.14

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	3.275.700.945	3.226.527.497	98,50%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.231.887.297	4.856.525.490	92,83%
	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100%
	b) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	31.253.040	31.253.016	99,99%
	c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	1.800.000	100%
	d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000	1.200.000	100%
	e) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	f) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	h) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000	600.000	100%
	i) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	j) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.879.500	3.879.500	100%
	k) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.203.745	52.203.745	100%
	l) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.240.000	16.240.000	100%
	m) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.594.000	69.594.000	100%
	n) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.000.000	30.914.000	99,72%
	o) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100%
	p) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	99.720.000	78.378.332	78,60%
	q) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.067.836	458.267.173	99,39%
	r) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.108.176	83.027.876	90,14%
	s) Pemeliharaan Mebel	3.300.000	3.300.000	100%
	t) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	26.800.000	26.800.000	100%
	u) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.735.000	139.242.000	99,65%

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	299.651.254	298.596.254	99,65%
	a) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kemantren	104.567.072	103.567.072	99,04%
	b) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	69.078.000	69.078.000	100%
	c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	34.796.182	34.796.182	100%
	d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	91.210.000	91.155.000	99,94%
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	160.615.000	160.615.000	100%
	a) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	84.500.000	84.500.000	100%
	b) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	76.115.000	76.115.000	100%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.776.133.394	1.761.816.601	99,19%
	a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan	598.780.000	597.528.000	99,79%
	b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan	192.550.000	191.197.000	99,30%
	c) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	638.004.130	627.272.128	98,32%
	d) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	346.799.264	345.819.473	99,72%
B.	Belanja Pegawai	4.192.586.000	3.851.025.848	91,85%
	Jumlah	7.468.286.945	7.077.553.345	94,77%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selain telah terlaksananya program dan kegiatan secara optimal, pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.15

**Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kemantren Gondomanan Tahun 2022**

No	Program / Kegiatan	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	3.226.527.497	49.173.448	1,50%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.856.525.490	375.361.807	7,17%
	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	0	0,00%
	b) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	31.253.040	24	0,0001%
	c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	0	0,00%
	d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000	0	0,00%
	e) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000	0	0,00%
	f) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000	0	0,00%
	g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	0	0,00%
	h) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000	0	0,00%
	i) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000	0	0,00%
	j) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.879.500	0	0,00%
	k) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.203.745	0	0,00%
	l) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.240.000	0	0,00%
	m) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.594.000	0	0,00%
	n) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.914.000	86.000	0,28%
	o) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0,00%
	p) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	78.378.332	21.341.668	27,23%
	q) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.267.173	2.800.663	0,61%
	r) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.027.876	9.080.300	10,94%
	s) Pemeliharaan Mebel	3.300.000	0	0,00%
	t) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	26.800.000	0	0,00%
	u) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.242.000	493.000	0,35%

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	298.596.254	1.055.000	0,35%
	a) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kemantren	103.567.072	1.000.000	0,06%
	b) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	69.078.000	0	0,00%
	c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	34.796.182	0	0,00%
	d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	91.155.000	55.000	0,06%
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	160.615.000	0	0,00%
	a) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	84.500.000	0	0,00%
	b) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	76.115.000	0	0,00%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.761.816.601	14.316.793	0,81%
	a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan	597.528.000	1.252.000	0,21%
	b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan	191.197.000	1.353.000	0,70%
	c) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	627.272.128	10.732.002	1,71%
	d) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	345.819.473	979.791	0,28%
B.	Belanja Pegawai	3.851.025.848	341.560.152	8,87%
	Jumlah	7.077.553.345	390.733.600	5,52%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2022

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan dikarenakan sebab-sebab eksternal maupun internal. Selain itu dapat dijelaskan pula penyebab tidak/belum terserapnya anggaran untuk program/kegiatan tersebut. Meskipun demikian, inefisiensi tersebut nilainya cukup kecil sehingga tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk dijadikan acuan agar di masa yang akan datang bisa diantisipasi sehingga program/kegiatan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif.

Hasil identifikasi menunjukkan efisiensi yang cukup besar terjadi pada program-program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi, penjelasannya adalah bahwa pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil berjalan tidak berdasarkan anggaran yang tersedia walaupun masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan rekening pemakaian dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Hal serupa terjadi pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, serta pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat efisiensi pada sub-sub anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang berupa paket kegiatan pembangunan fisik karena komponen-komponen biayanya menyesuaikan fluktuasi harga pasar, hasil negosiasi, dan tingkat ketepatan perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan.

b. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jika dirinci secara detail tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan masuk kategori Sangat Tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

- a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan

ketertiban. Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

- b) Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti *website*, *facebook*, *instagram*, *youtube* dan buletin Gondoarum menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Kemantren Gondomanan.
- c) Dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan konektivitas interface pelayanan Kemantren Gondomanan dengan masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di kemantren maupun kelurahan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharannya.
- b) Partisipasi, dukungan, keterlibatan dan swadaya masyarakat yang cukup tinggi, sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Formasi pegawai Kemantren Gondomanan saat ini baru terpenuhi 74% dari kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan, tentu ini belum memadai bagi organisasi Kemantren Gondomanan untuk menanggung beban tugas yang semakin berat dengan adanya pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks maupun alokasi dana kelurahan serta perubahan dalam mekanisme anggaran. Beberapa jabatan yang kosong sudah diisi melalui belanja jasa orang perseorangan (tenaga teknis, tenaga bantuan, dan *outsourcing*). Selain itu, dari segi kualitas juga sudah dilakukan

berbagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM pun masih dirasa kurang memadai.

2) Kegiatan yang bersifat “penjagaan”

Beberapa kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang, pembelian BBM) pada beberapa obyek sulit untuk diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang, penyerapan BBM yang kurang optimal karena mobilitas berkurang, dan sebagainya). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.

3) Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa

Beberapa kegiatan di hampir semua program khususnya yang bersifat tatap muka dan mengumpulkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan terpaksa harus dirasionalisasi (dihapus atau dikurangi volumenya) pada anggaran perubahan, karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penerapan PPKM. Kalaupun kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan maka harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

B. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2021 ini, Kemantren Gondomanan telah melakukan inovasi, sebagai berikut:

a. Inovasi Paket Pelayanan Komanan

Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada

pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban.

Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

b. Sosialisasi Pelayanan secara Virtual

Berupa pembuatan video pendek tentang sistem prosedur dan tatacara mengakses pelayanan, yang kemudian dipublikasikan melalui website, media sosial dan grup whatsapp warga agar semua lapisan masyarakat semakin memahami dan semakin mudah dalam mengakses layanan.

c. Pendampingan Layanan

Pendampingan oleh petugas diberikan kepada warga yang memiliki keterbatasan kemampuan mengakses teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung layanan. Beberapa warga berusia lanjut, difabel atau keluarga miskin kemungkinan menghadapi masalah dalam mengakses layanan berbasis online, sehingga perlu difasilitasi dan didampingi.

d. Inovasi Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa

Kegiatan Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa adalah gerakan kerja bakti massal untuk menjaga lingkungan dengan melibatkan segenap stakeholders yang bersinergi secara harmonis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi segenap stakeholders dalam menjaga dan mengelola kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Inovasi ini sudah berjalan beberapa tahun dan hasil nyata dari inovasi ini adalah Kemantren Gondomanan beberapa kali meraih predikat Kecamatan Adipura.

2. Prestasi

Kemantren Gondomanan selama kurun waktu tahun 2022 telah menorehkan beberapa prestasi sebagai berikut :

- a. TP PKK Kemantren Gondomanan meraih Juara III Lomba PAAR EDI (Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital) tingkat Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2022;
- b. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Ranting Kemantren Gondomanan meraih Terbaik I Kinerja Organisasi PWRI Tingkat DIY pada bulan Agustus 2022;
- c. Kemantren Gondomanan meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Daerah DIY pada bulan Agustus 2022;
- d. Kemantren Gondomanan meraih Peringkat II Lomba Evaluasi Kinerja Kemantren tingkat Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2022;
- e. Kemantren Gondomanan (diwakili RW 10 Kauman Kelurahan Ngupasan) meraih Juara III Lomba Kampung Proklim Tingkat Kota Yogyakarta pada bulan Desember 2022;
- f. Kemantren Gondomanan (diwakili oleh Pokja III TP PKK Kemantren Gondomanan) meraih Juara III Lomba Menu B2SA Tingkat Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2022.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2021

Dari hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 ada beberapa catatan dan rekomendasi terhadap LKIP Kemantren Gondomanan yang kemudian menjadi komitmen seluruh entitas organisasi Kemantren Gondomanan untuk menindaklanjutinya. Komitmen ini merupakan upaya terus menerus yang dilakukan untuk menuju keadaan dan mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Tindaklanjut rekomendasi terhadap LKIP tahun 2021 dilaksanakan sejak diterimanya hasil penilaian LKIP oleh Inspektorat, yaitu pada bulan Juni 2022. Setelah membaca hasil penilaian dan rekomendasi, Mantri Pamong Praja segera mengadakan koordinasi untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. Dengan demikian potensi kesalahan dan keterlambatan dapat segera diminimalkan bahkan ditiadakan.

Tabel III.16

Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP 2021 dan Tindaklanjutnya

No.	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindaklanjut	Bukti Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengukuran Kinerja	Terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang belum mengacu pada IKU unit kerja organisasi/ atasannya	Melakukan pencermatan terhadap ukuran (indikator) kinerja individu agar sesuai dengan IKU organisasi/ atasan	Melakukan cascading SKP sesuai Permenpan RB No.6 Tahun 2022 dengan menyesuaikan kinerja individu dengan IKU unit kerja organisasi/ atasannya.	Matriks cascading SKP Kemantren Gondomanan berdasarkan Permenpan RB No.6 Tahun 2022
2	Pelaporan Kinerja	Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan capaian instansi/ organisasi sejenis yang setara atau sekelas	Menyajikan perbandingan capaian instansi/organisasi sejenis yang setara atau sekelas di dalam Laporan Kinerja	Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/organisasi sejenis (Kemantren lain) dan akan disertakan dalam penyusunan LKIP tahun 2022.	Matriks perbandingan capaian kinerja Kemantren Gondomanan dengan Kemantren lain.

Sumber : Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022.

Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Cascading SKP sesuai Permenpan RB No.6 Tahun 2022
 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 maka telah dilakukan penyesuaian penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai. Cascading tersebut memungkinkan setiap pegawai memiliki indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja/organisasi atasannya.
 Matriks cascading SKP yang telah disusun sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.1
2. Melakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/ organisasi sejenis
 Kemantren Gondomanan telah melakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/organisasi sejenis dengan cara melihat data capaian kinerja di data LKIP pada website beberapa Kemantren lain sebagaimana terlihat pada matriks berikut :

Tabel III.17
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Instansi/
Organisasi Sejenis

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Kemantren Tahun 2021 (Target/Realisasi)				Keterangan
		Gondomanan	Ngampilan	Kraton	Gedongtengen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren	366,5 / 367	389 / 396,5	346,67 / 346,67	370 / 371,5	
2	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	Belum dijadikan IKU Program
3	Nilai Hasil Survei SKM	87,9 / 88,57	84,15 / 84,16	77,19 / 85,25	81,59 / 81,60	
4	Penurunan Angka Pelanggaran Perda	160 / 145	240 / -	100 / 38	96 / 94	
5	Angka Swadaya Murni	469.500.000 / 1.962.512.500	684.460.000 / 692.230.000	429.601.667 / 964.503.000	632.535.000 / 1.014.273.100	

Sumber : Analisis Data LKIP 2021 di Website Kemantren Gondomanan, Ngampilan, Kraton dan Gedongtengen.

Dari data perbandingan tersebut diatas maka diketahui bahwa penetapan target dari masing-masing Kemantren nilai baseline nya berbeda-beda, namun capaian realisasi secara keseluruhan tercapai 100% atau lebih.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam tahun 2022 sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukkan pencapaian target yang sangat baik. Hal itu menunjukkan segala upaya yang dilakukan Kemantren Gondomanan secara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Kemantren Gondomanan yang dilaksanakan oleh aparat kemantren tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders* se-Kemantren Gondomanan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, dan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan kinerja Kemantren Gondomanan. Untuk itu koordinasi antar lini harus terus ditingkatkan sehingga hasil pencapaian tujuan dan kinerja organisasi pada tahun yang akan datang akan semakin baik.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan pada tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, beberapa rekomendasi terhadap laporan LKIP tahun sebelumnya (2021) juga menjadi perhatian dalam menentukan tindaklanjut untuk upaya perbaikan.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kemantren Gondomanan dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untuk antisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat

mempengaruhi jalannya kinerja instansi.

3. Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesamaan persepsi dan gerak dalam menjalankan visi dan misi instansi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun Anggaran 2022 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.